



PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI

A. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI

- ✚ NTP Provinsi Lampung Maret 2017 untuk masing-masing subsektor tercatat sebesar 99,42 untuk Subsektor Padi & Palawija (NTP-P), 97,05 untuk Subsektor Hortikultura (NTP-H), 104,29 untuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr), 115,53 untuk Subsektor Peternakan (NTP-Pt), 109,81 untuk Subsektor Perikanan Tangkap, dan 94,64 untuk Subsektor Perikanan Budidaya. Sedangkan NTP Provinsi Lampung tercatat sebesar 103,82.
- ✚ Pada Maret 2017, sebagian besar komoditas mengalami penurunan harga, kecuali pada komoditas peternakan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya. Adapun harga-harga yang mengalami penurunan harga antara lain pada komoditas : gabah, ketela pohon/ubi kayu, ubi jalar, beberapa jenis sayur-sayuran dan buah-buahan, beberapa tanaman perkebunan seperti kopi, karet, kelapa sawit, dan lada.
- ✚ Beberapa subsektor mengalami penurunan NTP pada Maret 2017, kecuali subsektor peternakan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya. Secara rinci, subsektor pertanian tanaman pangan mengalami penurunan sebesar 0,48 persen, subsektor tanaman hortikultura turun sebesar 0,84 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat turun sebesar 0,89 persen, subsektor peternakan naik sebesar 0,76 persen, subsektor perikanan tangkap naik sebesar 0,88 persen, dan subsektor perikanan budidaya naik sebesar 0,38 persen. NTP Provinsi Lampung secara gabungan turun sebesar 0,36 persen.
- ✚ Dari 33 provinsi yang diamati perkembangan harganya pada Maret 2017, ada 4 provinsi mengalami kenaikan NTP dan 29 provinsi lainnya mengalami penurunan. Kenaikan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat dengan peningkatan sebesar 0,58 persen, sedangkan penurunan NTP terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang turun sebesar 1,37 persen.
- ✚ Maret 2017 di daerah perdesaan di Provinsi Lampung mengalami deflasi sebesar 0,16 persen. Deflasi disebabkan oleh turunnya indeks harga pada beberapa kelompok yaitu kelompok bahan makanan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, dan kelompok transportasi dan komunikasi. Sedangkan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, dan kelompok kesehatan mengalami kenaikan indeks harga.

Nilai tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Tabel 1. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Provinsi Lampung Per Subsektor Februari 2017 s.d. Maret 2017 (2012=100)

Subsektor (1)	Bulan		Persentase Perubahan (4)
	Februari 2017 (2)	Maret 2017 (3)	
1. Tanaman Padi & Palawija			
a. Indeks yang Diterima (It)	127,75	126,92	(0,65)
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	127,89	127,66	(1,22)
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	99,89	99,42	(0,48)
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-P)	108,41	107,49	(0,85)
2. Hortikultura			
a. Indeks yang Diterima (It)	122,43	121,29	(0,93)
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	125,08	124,97	(0,09)
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	97,88	97,05	(0,84)
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-H)	109,35	108,32	(0,95)
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Indeks yang Diterima (It)	133,15	131,95	(0,90)
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	126,54	126,52	(0,01)
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	105,22	104,29	(0,89)
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-Pr)	116,06	114,29	(1,53)
4. Peternakan			
a. Indeks yang Diterima (It)	135,79	136,93	0,84
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	118,43	118,52	0,08
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	114,66	115,53	0,76
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-Pt)	122,65	123,46	0,66
5. Perikanan Tangkap			
a. Indeks yang Diterima (It)	132,38	133,50	0,85
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	121,62	121,58	(0,03)
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	108,85	109,81	0,88
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-Pi)	120,48	121,41	0,78
6. Perikanan Budidaya			
a. Indeks yang Diterima (It)	116,17	116,61	0,39
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	123,21	123,22	0,01
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	94,29	94,64	0,38
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP-Pi)	100,98	101,28	0,30
Gabungan			
a. Indeks yang Diterima (It)	130,09	129,55	(0,41)
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	124,85	124,79	(0,06)
c. Nilai Tukar Petani (NTPp)	104,19	103,82	(0,36)
d. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUPp)	113,83	113,02	(0,71)

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 12 (dua belas) kabupaten di Provinsi Lampung, pada Maret 2017 NTP Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 0,36 persen dibandingkan dengan Februari 2017 yang sebesar 104,19. Sementara itu, NTP nasional turun sebesar 0,38 persen, dari sebesar 100,33 pada Februari 2017 menjadi 99,95 pada Maret 2017.

1. NTP Subsektor

a. Subsektor Padi & Palawija (NTP-P)

Pada Maret 2017 NTP-P Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 0,48 persen disebabkan oleh penurunan indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibayar petani yaitu masing-masing sebesar 0,65 persen dan 0,18 persen. Sementara penurunan Ib yang sebesar 0,18 persen disebabkan oleh turunnya indeks konsumsi rumahtangga (IKRT) dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) masing-masing sebesar 0,31 persen dan 0,09 persen.

b. Subsektor Hortikultura (NTP-H)

NTP-H bulan Maret 2017 Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 0,84 persen disebabkan oleh penurunan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,93 persen dan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,09 persen. Penurunan indeks yang dibayar petani sebesar 0,09 persen, akibat dari turunnya indeks harga konsumsi rumah tangga sebesar 0,12 persen dan naiknya indeks BPPBM sebesar 0,01 persen.

c. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr)

NTP-Pr bulan Maret 2017 mengalami penurunan sebesar 0,89 persen disebabkan oleh penurunan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,90 persen dan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,01 persen. Penurunan indeks yang dibayar petani sebesar 0,01 persen, akibat dari turunnya indeks harga konsumsi rumah tangga sebesar 0,16 persen dan naiknya indeks BPPBM sebesar 0,64 persen.

d. Subsektor Peternakan (NTP-Pt)

Pada Maret 2017 NTP-Pt Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 0,76 persen karena kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih besar dibandingkan indeks harga yang dibayar petani yaitu masing-masing sebesar 0,84 persen dan 0,08 persen. Sementara kenaikan Ib yang sebesar 0,08 persen disebabkan oleh turunnya indeks konsumsi rumahtangga (IKRT) sebesar 0,04 persen dan naiknya indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) sebesar 0,18 persen.

e. Subsektor Perikanan Tangkap

Pada Maret 2017 NTP subsektor Perikanan Tangkap Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 0,88 persen karena kenaikan indeks harga yang diterima petani yang sebesar 0,85 persen dan penurunan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,03 persen. Sementara penurunan Ib yang sebesar 0,03 persen disebabkan oleh turunnya indeks konsumsi rumahtangga (IKRT) sebesar 0,09 persen dan naiknya indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) sebesar 0,07 persen.

f. Subsektor Perikanan Budidaya

Pada Maret 2017 NTP subsektor Perikanan Budidaya Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 0,38 persen, karena peningkatan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,39 persen, lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,01 persen. Sementara kenaikan Ib yang sebesar 0,01 persen disebabkan oleh turunnya indeks konsumsi rumahtangga (IKRT) sebesar 0,04 persen dan naiknya indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) sebesar 0,09 persen.

**Tabel 2. Nilai Tukar Petani Per Subsektor dan Perubahannya
Februari 2017 s.d. Maret 2017 (2012=100)**

Kelompok dan Sub kelompok	Bulan		Persentase Perubahan
	Februari 2017	Maret 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan			
a. Indeks Diterima Petani	127,75	126,92	(0,65)
- Padi	134,09	132,45	(1,22)
- Palawija	122,69	122,49	(0,16)
b. Indeks Dibayar Petani	127,89	127,66	(0,18)
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	130,58	130,23	(0,27)
- Indeks BPPBM	117,84	118,07	0,20
2. Hortikultura			
a. Indeks Diterima Petani	122,43	121,29	(0,93)
- Sayur-sayuran	126,56	125,06	(1,18)
- Buah-buahan	117,61	116,88	(0,62)
- Tanaman Obat	122,23	120,64	(1,30)
b. Indeks Dibayar Petani	125,08	124,97	(0,09)
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	129,41	129,25	(0,12)
- Indeks BPPBM	111,96	111,97	0,01
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Indeks Diterima Petani	133,15	131,95	(0,90)
- Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR)	133,15	131,95	(0,90)
b. Indeks Dibayar Petani	126,54	126,52	(0,01)
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	129,51	129,30	(0,16)
- Indeks BPPBM	114,72	115,45	0,64
4. Peternakan			
a. Indeks Diterima Petani	135,79	136,93	0,84
- Ternak Besar	140,79	142,76	1,40
- Ternak Kecil	137,15	135,70	(1,06)
- Unggas	125,54	126,80	1,00
- Hasil Ternak	119,79	118,16	(1,36)
b. Indeks Dibayar Petani	118,43	118,52	0,08
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	128,85	128,81	(0,04)
- Indeks BPPBM	110,71	110,91	0,18
5. Perikanan Tangkap			
a. Indeks Diterima Petani	132,38	133,50	0,85
- Penangkapan Perairan Umum	141,75	143,97	1,57
- Penangkapan Laut	132,08	133,16	0,82
b. Indeks Dibayar Petani	121,62	121,58	(0,03)
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	130,42	130,30	(0,09)
- Indeks BPPBM	109,88	109,96	0,07
6. Perikanan Budidaya			
a. Indeks Diterima Petani	116,17	116,62	0,39
- Budidaya Air Tawar	127,57	128,34	0,60
- Budidaya Laut	100,00	100,00	0,00
- Budidaya Air Payau	123,46	124,27	0,66
b. Indeks Dibayar Petani	123,21	123,22	0,01
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	129,16	129,10	(0,04)
- Indeks BPPBM	115,04	115,14	0,09

2. Perbandingan Antar Provinsi

Dari 33 provinsi yang diamati perkembangan harganya pada Maret 2017, ada 4 provinsi mengalami kenaikan NTP dan 29 provinsi lainnya mengalami penurunan. Kenaikan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat dengan peningkatan sebesar 0,58 persen, sedangkan penurunan NTP terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang turun sebesar 1,37 persen. (Tabel 3).

**Tabel 3. Nilai Tukar Petani Provinsi-Provinsi dan Persentase Perubahannya
Maret 2017 (2012=100)**

Provinsi	IT		IB		NTP		NTUP	
	Indeks	% Perb	Indeks	% Perb	Rasio	% Perb	Rasio	% Perb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	119,20	(0,93)	125,32	(0,59)	95,11	(0,35)	101,90	(1,18)
Sumatera Utara	128,19	0,16	128,48	0,19	99,77	(0,03)	107,40	(0,10)
Sumatera Barat	123,65	(0,11)	125,93	0,35	98,19	(0,46)	109,50	(0,20)
Riau	131,86	(0,19)	127,40	0,10	103,50	(0,29)	115,30	(0,25)
Jambi	127,08	(0,80)	125,83	(0,03)	100,99	(0,77)	109,16	(0,96)
Sumatera Selatan	118,69	(0,80)	125,01	0,15	94,94	(0,94)	102,85	(0,97)
Bengkulu	121,53	(0,20)	127,43	0,32	95,37	(0,52)	106,03	(0,43)
Lampung	129,55	(0,41)	124,79	(0,06)	103,82	(0,36)	113,02	(0,71)
Bangka Belitung	119,77	(1,08)	122,04	(0,05)	98,14	(1,03)	107,16	(1,23)
Kep. Riau	119,01	(0,92)	121,25	0,07	98,16	(0,99)	107,94	(0,92)
DKI Jakarta	119,56	(0,98)	120,83	0,40	98,95	(1,37)	110,51	(0,98)
Jawa Barat	133,09	(0,08)	130,01	0,08	102,37	(0,16)	111,98	(0,18)
Jawa Tengah	124,27	(0,56)	127,46	(0,03)	97,50	(0,53)	104,44	(1,04)
DI Yogyakarta	127,93	(0,67)	126,26	(0,21)	101,32	(0,45)	111,46	(1,06)
Jawa Timur	131,61	(0,49)	129,46	(0,34)	101,66	(0,15)	110,79	(0,61)
Banten	123,74	0,50	126,02	0,23	98,19	0,27	103,37	0,03
Bali	129,90	(1,14)	124,05	(0,14)	104,72	(1,01)	112,78	(1,41)
Nusa Tenggara Barat	130,78	(0,19)	124,90	(0,31)	104,71	0,13	112,81	(0,48)
Nusa Tenggara Timur	126,69	(0,01)	125,64	0,17	100,84	(0,18)	111,15	(0,17)
Kalimantan Barat	122,42	(1,22)	125,66	0,09	97,42	(1,30)	105,77	(1,45)
Kalimantan Tengah	124,82	0,03	124,66	0,40	100,14	(0,37)	107,82	(0,12)
Kalimantan Selatan	118,57	(1,08)	121,76	0,12	97,38	(1,20)	105,64	(1,21)
Kalimantan Timur	122,77	(0,42)	124,95	0,33	98,25	(0,74)	109,64	(0,63)
Sulawesi Utara	116,25	(0,34)	126,84	0,56	91,65	(0,89)	102,73	(0,57)
Sulawesi Tengah	120,70	(0,57)	126,58	0,40	95,36	(0,96)	105,28	(1,27)
Sulawesi Selatan	127,74	(0,56)	126,80	0,10	100,74	(0,66)	110,84	(0,66)
Sulawesi Tenggara	120,12	(0,74)	124,91	0,39	96,16	(1,13)	105,66	(0,89)
Gorontalo	132,11	(0,34)	126,51	0,50	104,43	(0,84)	119,33	(0,41)
Sulawesi Barat	128,43	(0,75)	121,81	0,16	105,44	(0,91)	116,23	(0,91)
Maluku	128,25	0,60	127,75	0,23	100,39	0,37	120,36	0,58
Maluku Utara	126,29	0,18	125,02	0,36	101,01	(0,18)	111,98	(0,07)
Papua Barat	128,24	0,87	126,56	0,29	101,33	0,58	114,11	0,72
Papua	120,84	0,57	125,79	0,61	96,07	(0,03)	113,24	0,35
Nasional	127,19	(0,39)	127,25	(0,01)	99,95	(0,38)	108,93	(0,63)

Di wilayah Sumatera seluruh provinsi mengalami penurunan NTP. Penurunan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 1,03 persen dan penurunan terendah terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,03 persen. NTP Provinsi Lampung pada bulan Maret 2017 sebesar 103,82 persen merupakan NTP tertinggi pertama di Sumatera. Sedangkan NTP terendah terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 94,94 persen. NTP Provinsi Lampung yang turun sebesar 0,36 persen menempati peringkat ke-4 di wilayah Sumatera dan peringkat ke-13 secara nasional. (Tabel 4).

Tabel 4. Perbandingan NTP dan Perubahan NTP Maret 2017 menurut Provinsi se-Sumatera (2012=100)

Provinsi	NTP	Ranking	Perubahan NTP (%)	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	95,11	9	(0,35)	8
Sumatera Utara	99,77	4	(0,03)	10
Sumatera Barat	98,19	5	(0,46)	6
Riau	103,50	2	(0,29)	9
Jambi	100,99	3	(0,77)	4
Sumatera Selatan	94,94	10	(0,94)	3
Bengkulu	95,37	8	(0,52)	5
Lampung	103,82	1	(0,36)	7
Bangka Belitung	98,14	7	(1,03)	1
Kep. Riau	98,16	6	(0,99)	2

3. Indeks Harga Konsumen Perdesaan

Pada Maret 2017 di daerah perdesaan di Provinsi Lampung mengalami deflasi sebesar 0,16 persen yang disebabkan adanya penurunan indeks harga pada beberapa kelompok. Secara rinci sebagai berikut : kelompok bahan makanan turun sebesar 0,85 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau naik sebesar 0,11 persen, kelompok perumahan naik sebesar 1,17 persen, kelompok sandang naik sebesar 0,67 persen, kelompok kesehatan naik sebesar 0,23 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga turun sebesar 0,02 persen, dan kelompok transportasi dan komunikasi turun sebesar 0,11 persen.

Keterbandingan inflasi perdesaan di seluruh Indonesia pada bulan Maret 2017, inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Papua yaitu sebesar 0,73 persen dan terendah di Provinsi Aceh sebesar (0,78) persen. Provinsi Lampung dengan deflasi perdesaan sebesar 0,16 persen menempati peringkat ke-27 secara nasional. (Tabel 5).

Tabel 5. Persentase Perubahan Indeks Harga Konsumen Perdesaan menurut Provinsi Maret 2017 (2012=100)

Provinsi	Bahan Makanan	Makanan Jadi	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Transportasi		Inflasi Perdesaan	Ranking Inflasi
						Rekreasi & Olahraga	Dan Komunikasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	(1,79)	0,22	0,10	0,06	0,40	0,00	(0,15)	(0,78)	33
Sumatera Utara	(0,07)	0,43	1,36	0,19	0,34	0,05	(0,34)	0,18	15
Sumatera Barat	0,52	0,31	0,80	0,50	0,29	0,00	(0,06)	0,41	8
Riau	(0,02)	(0,03)	1,53	(0,19)	0,17	0,03	(0,36)	0,10	22
Jambi	(0,54)	0,12	1,45	0,20	0,02	0,58	(0,18)	(0,05)	25
Sumatera Selatan	(0,38)	0,45	2,05	0,33	0,12	0,01	(0,35)	0,12	20
Bengkulu	(0,15)	0,71	1,53	0,45	0,77	0,28	0,11	0,37	10
Lampung	(0,85)	0,11	1,17	0,67	0,23	(0,02)	(0,11)	(0,16)	27
Bangka Belitung	(0,81)	0,05	1,79	0,11	0,48	0,00	0,08	(0,10)	26
Kep. Riau	(0,29)	0,66	0,60	(0,12)	0,24	0,04	(0,12)	0,09	23
DKI Jakarta	0,82	0,92	0,42	0,32	0,00	0,00	0,16	0,62	4
Jawa Barat	(0,24)	0,59	0,36	0,17	0,63	(0,02)	(0,13)	0,11	21
Jawa Tengah	(1,05)	0,41	0,63	0,27	0,50	0,05	(0,04)	(0,27)	28
DI Yogyakarta	(1,64)	0,43	1,74	0,27	0,11	0,00	(0,14)	(0,36)	30
Jawa Timur	(1,58)	0,16	0,98	0,07	0,38	0,18	(0,17)	(0,53)	32
Banten	(0,75)	1,22	0,59	1,21	0,79	0,07	0,33	0,22	14
Bali	(0,84)	0,05	0,26	(0,03)	0,26	0,02	0,01	(0,28)	29
Nusa Tenggara Barat	(1,37)	0,06	0,69	0,31	0,22	0,16	0,16	(0,51)	31
Nusa Tenggara Timur	0,07	0,04	0,69	0,40	0,23	0,06	0,21	0,17	17
Kalimantan Barat	(0,35)	0,43	1,06	0,26	0,27	0,02	(0,02)	0,05	24
Kalimantan Tengah	0,18	0,41	1,57	1,04	0,50	0,15	0,48	0,46	5
Kalimantan Selatan	(0,29)	0,58	0,82	0,08	0,31	0,38	(0,02)	0,12	19
Kalimantan Timur	0,48	0,42	0,48	0,15	0,31	0,08	(0,05)	0,38	9
Sulawesi Utara	1,27	0,18	0,24	0,15	0,19	0,00	(0,12)	0,67	2
Sulawesi Tengah	0,14	0,63	0,55	1,14	0,88	0,16	(0,02)	0,34	11
Sulawesi Selatan	(0,14)	0,34	0,50	0,11	0,13	0,15	0,42	0,13	18
Sulawesi Tenggara	0,69	0,19	0,82	0,11	0,05	0,32	(0,02)	0,45	6
Gorontalo	1,12	0,26	0,01	0,12	0,43	0,26	(0,01)	0,64	3
Sulawesi Barat	0,32	0,15	0,11	(0,06)	0,01	0,00	(0,06)	0,18	8
Maluku	0,24	0,52	0,20	0,20	0,24	0,31	(0,04)	0,27	13
Maluku Utara	0,46	0,50	0,52	1,13	0,03	0,04	(0,11)	0,43	7
Papua Barat	0,40	0,04	0,94	0,19	0,28	0,03	0,08	0,32	12
Papua	1,15	0,56	0,14	0,07	0,10	0,04	0,47	0,73	1

Keterangan lebih lanjut hubungi :

Kepala Bidang Statistik Distribusi

Bambang Widjonarko, SP

Telpon (0721) 482909/484329

Email: shk1800@bps.go.id



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Teluk Betung Bandar Lampung 35215

Telepon (0721) 482909, 484329; Faksimili (0721) 484329

Email: bps1800@bps.go.id

Website: lampung.bps.go.id